



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 75, 2022

PEMERINTAHAN. Kepemudaan.
Penyelenggaraan. Lintas Sektor. Koordinasi.
Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan kepemudaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda.

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. efektivitas pelayanan Kepemudaan;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
- c. kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

BAB II

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan

- kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III
STRATEGI DAN PELAKSANAAN
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/lembaga;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.

- (2) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian *output*;
 - c. indikator;
 - d. *baseline*;
 - e. target; dan
 - f. kementerian/lembaga pelaksana.
- (4) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan 5 (lima) tahun berikutnya yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (6) Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.

- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur Dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
 - b. tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
 - c. tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tim pengarah; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 12

Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketua : Wakil Presiden;
- b. sekretaris : Menteri;
- c. anggota :
 1. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 2. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 3. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
 4. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 13

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketua : Menteri;
- b. anggota :
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
 12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

13. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
14. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
15. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
16. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
17. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
18. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
19. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
20. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
21. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta

- invensi dan inovasi yang terintegrasi;
22. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan;
 23. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 24. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 25. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba;
 26. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme; dan
 27. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 14

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 15

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Presiden melalui ketua tim pengarah.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tim pelaksana dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Bagian Keempat
Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Kelima
Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB V
MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja internal tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja antara tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 23

- (1) Bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Menteri selaku ketua tim pelaksana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Presiden melalui ketua tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan.
- (6) Hasil perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Pasal 25

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Bupati/wali kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Penyesuaian tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2022
 TENTANG
 KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2021-2024

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1) A. PROGRAM SINERGIS ANTAR SEKTOR DALAM HAL PENYADARAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN	(2) Domain Pendidikan 1. Rata-rata lama sekolah Pemuda; 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah Pemuda; dan 3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi.	(3) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas (tahun) Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah	(4) 8,75 92,46	(5) 8,85 8,95 9,06 94,34 96,23 98,11 100,00	(6) 			

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA		
	KODE	(2)			(3)	(4)	2021		2022	2023
(1) KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN PEMUDA		Bentuk Koordinasi: a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan; b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan; dan c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.	(3) Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ sederajat (persen/%) Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ sederajat (persen/%) Angka partisipasi kasar perguruan tinggi (persen/%)	(4) 95,53 30,85	31,16	31,52	31,89	37,63	(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi	
	023.DH	PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN								
	023.DH.42 76	Kegiatan: Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan								
6.QDB.006	Satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyektif pemajuan kebudayaan	yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyektif pemajuan kebudayaan (satu pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyektif pemajuan kebudayaan (satu pendidikan)	0	944	944	944	944		

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA			
	KODE	(2)			(3)	(4)	2021		2022	2023	2024
(1)	2022	Kegiatan: Pembinaan Bahasa dan Sastra									
	2022.QDC.0 03	RO: Peningkatan literasi generasi muda	Generasi muda terbina program literasi (orang)	5.000	5.000	13.575	19.147	19.147			
	023.DI	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN									
	023.DI.63	Kegiatan: Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik									
	023.DI.6396 SBB.001	RO: Peserta didik jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya (orang)	1.992	2.446	544	2.568	2.568			
	023.DI.6396 SBB.002	RO: Peserta didik jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya (orang)	1.860	1.672	340	1.756	1.756			
	023.DI.6396 SBA.001	RO: Peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya (orang)	4.779	4.833	3.525	5.074	5.074			

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	023.DI.63 93	(2) Kegiatan: Kebijakan Penguatan Karakter	(3)	(4)	(5)			(6)
	023.DI.639 3.QMB.006	RO: Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebhinekaan satuan pendidikan	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan (provinsi/kabupaten/kota)	0	55	164	329	548
	023.DI.639 3.QMB.005	RO: Layanan penguatan karakter terkait iklim keamanan satuan pendidikan	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan (provinsi/kabupaten/kota)	0	55	164	329	548

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	023.DF	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN						
	023.DF.44	Kegiatan:						
	65	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah						
	023.DF.446	RO:	Jumlah siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (orang)	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	
	5.QEK.013	Siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar						
	023.DF.446	RO:	Jumlah siswa SMA/Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (orang)	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	
	5.QEK.014	Siswa SMA/Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar						
	023.DF.446	RO:	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (orang)	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	
	5.QEK.015	Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar						
	023.DF.56	Kegiatan:						
	26	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus						
	023.DF.562	RO:	Jumlah siswa penerima program pendidikan layanan khusus (orang)	2.895	2.895	3.048	3.048	
	6.QEK.507	Siswa penerima afirmasi pendidikan menengah...						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	
	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI							
	023.01.DK.4469	Kegiatan: Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi						
	023.01.DK.4469.QEJ.001	RO: Mahasiswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	604.930	1.108.810	594.539	909.777	1.003.310
	023.01.DK.4469.QEJ.002	RO: Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi.	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (orang)	5.945	7.382	8.017	8.402	8.042
	023.01.DK.4258	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan						
	023.01.DK.4258.QEJ.002	RO: Mahasiswa menjalankan wirausaha.	Jumlah mahasiswa menjalankan wirausaha (orang)	3.000	3.000	2.500	3.000	3.300
	023.01.DK.4258.QEJ.004	RO: Mahasiswa mengikuti pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah mahasiswa mengikuti pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (orang)	2.000	6.890	3.075	11.000	13.000

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN							
	025.DF.21	Kegiatan:						
	29	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah						
	025.DF.212	RO:	Jumlah siswa MTs penerima Indonesia Pintar (orang)	745.086	745.086	745.086	745.086	
	9.QEK.002	Siswa MTs penerima Program Indonesia Pintar*						
	025.DF.212	RO:	Jumlah siswa MA penerima Program Indonesia Pintar (orang)	320.372	320.372	320.372	320.372	
	9.QEK.003	Siswa MA penerima Program Indonesia Pintar						
	025.DF.21	Kegiatan:						
	28	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam						
	025.DF.212	RO:	Jumlah santri pondok pesantren salafiyah wustha/Paket B/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar (orang)	105	92.533	92.533	92.533	
	8.QEK.002	Santri pondok pesantren salafiyah wustha/Paket B/hanya mengaji/ muadalah penerima Program Indonesia Pintar*						
	025.DF.212	RO:	Jumlah santri pondok pesantren salafiyah ulya/Paket C/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar (orang)	53.556	45.571	45.571	45.571	
	8.QEK.003	Santri pondok pesantren salafiyah ulya/Paket C/hanya mengaji/ muadalah penerima Program Indonesia Pintar.						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	025.DF.21	Kegiatan:						
	36	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen						
	025.DF.213	RO:	Jumlah siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Umum Agama Kristen penerima Program Indonesia Pintar	7.022	11.309	8.300	9.430	10.322
	6.QEK.001							
	025.DF.213	RO:	Jumlah siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar*	1.994	2.769	3.241	3.842	4.485
	6.QEK.002							
	025.DF.21	Kegiatan:						
	39	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik						
	025.DF.213	RO:	Jumlah siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar	600	2.087	2.078	2.078	2.078
	9.QEK.009							
	025.DF.21	Kegiatan:						
	42	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu						
	025.DF.214	RO:	Jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat madya*	90	102	156	180	215
	2.QEK.005							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)	025.DF.214 2.QEK.006	RO: Siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat utama	(3) Jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat utama (orang)	(4) 23	(5) 65	432	495	560	(6)
	025.DK	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI							
	025.04.DK.2132	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam							
	025.04.DK.2132.QEJ.006	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam penerima Bidikmisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam Penerima Bidikmisi (orang)	26.000	26.000	18.850	19.000	19.000	
	025.04.DK.2132.QEJ.007	RO: Mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	17.615	17.615	52.795	52.795	52.795	
	025.05.DK.5101	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen							
	025.05.DK.5101.QEJ.001	RO: Mahasiswa perguruan tinggi Kristen penerima Bidikmisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Kristen Penerima Bidikmisi (orang)	3.674	5.611	4.659	7.438	9.873	
	025.05.DK.	RO:	Jumlah mahasiswa	1.361	1.664	1.361	1.361	1.361	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	5101.QEJ.02	Mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	(3) perguruan tinggi keagamaan penerima Peningkatan Akademik (orang)	(4)	(5)			(6)
	025.06.DK.2131	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik						
	025.06.DK.2131.QEJ.04	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Katolik penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah perguruan tinggi keagamaan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	100	200	300	400	500
	025.07.DK.5104	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu						
	025.07.DK.5104.QEJ.01	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima Program Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima Program Indonesia Pintar Kuliah (orang)	2.167	2.844	2.844	3.097	3.182
	025.07.DK.5104.QEJ.05	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (orang)	1.160	1.160	1.693	2.038	2.138
	025.08.DK.	Kegiatan:						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	
	5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha						
	025.08.DK.5106.QEJ.001	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	452	628	760	604	654
	025.08.DK.5106.QEJ.002	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Prestasi Akademik	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Buddha Peningkatan Prestasi Akademik (orang)	50	299	58	71	86
	029.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						
	029.DL.5442	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan						
	029.DL.5442.SAE.001	RO: Tenaga teknis menengah kejuruan yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan yang kompeten dan bersertifikat (orang)	466	479	481	473	473
	040.DL	PROGRAM LULUSAN SEKOLAH TINGGI VOKASI EKONOMI KREATIF						
								Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian yang

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	040.DL.53	Kegiatan: Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	(3)	(4)	(5)			(6)
	040.DL.53	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Pariwisata Bali	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	700	650	650	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif
	040.DL.53	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Pariwisata Bandung	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	800	670	800	
	040.DL.53	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Pariwisata Makassar	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	2.850	2.850	3.500	4.000
	040.DL.53	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Pariwisata Medan	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	500	385	400	400
	040.DL.53	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Pariwisata Palembang	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	289	350	350	360
	040.DL.53	RO:	Jumlah sertifikasi profesi	N/A	500	325	380	385

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	49.PDI.006	Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Lombok	(3) dan sumber daya manusia (orang)	(4)	(5)			(6)
	040.DL.534 9.SAD.001	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	2.500	2.000	0	0
	040.DL.534 9.SAD.002	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	2.350	2.350	2.350	2.350
	040.DL.534 9.SAD.003	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	2.027	2.027	1.900	1.900
	040.DL.534 9.SAD.004	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.400	1.500	1.641	1.641
	040.DL.534 9.SAD.005	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.200	979	2.000	2.500
	040.DL.534	RO:	Jumlah mahasiswa yang	N/A	1.400	1.278	1.500	1.600

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	9.SAD.006	Penyelenggaraan Politeknik Pariwisata Lombok	(3) mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	(4)			(5)	(6)
	040.DL.534 9.SAD.007	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	300	300	300	300
	040.DL.534 9.SAD.008	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	300	300	300	300
	040.DL.534 9.SAD.009	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	550	550	550	550
	040.DL.534 9.SAD.010	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	100	100	100	100
	040.DL.534 9.SAD.011	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Palimbang	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	100	100	100	100
	040.DL.534	RO:	Jumlah mahasiswa yang	N/A	100	100	100	100

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	(2)			(3)	(4)	2021	2022	
(1)	9.SAD.012	Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Lombok	mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	(5)					(6)
	040.DL.534	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	
	040.DL.534	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	50	50	50	
	040.DL.534	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	41	300	300	
	040.DL.534	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Makassar	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	46	100	100	
	040.DL.534	RO:	Jumlah mahasiswa yang		N/A	79	100	100	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	(2)			(3)	(4)	2021	2022	
(1)	9.SAD.018	Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Palembang	mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	(4)			(5)		(6)
	040.DL.534 9.SAD.019	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	
	040.DL.534 9.SCD.001	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.100	0	0	0	0
	040.DL.534 9.SCD.002	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	550	0	0	0	0
	040.DL.534 9.SCD.003	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	310	0	0	0	0

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	040.DL.534 9.SCD.004	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Medan	(3) Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	(4) N/A	(5) 600	0	0	(6)
	040.DL.534 9.SCD.005	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	400	0	0	
	040.DL.534 9.SCD.006	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	300	0	0	
057.DM PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN LITERASI								
057.DM.43 Kegiatan:								
84 Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus								
057.DM.438 4.QEI.004	RO: Perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	681	1.048	863	880	880	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	
	057.DM.30	Kegiatan :						
	04	Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara						
	057.DM.300	RO:	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Nasional	60	400	1.837	1.837	
	4.QAA.001	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Nasional	Perpustakaan Nasional (orang)					
	057.DM.30	Kegiatan:						
	10	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno						
	057.DM.301	RO:	Jumlah penerima layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno	433	500	1.100	1.100	
	0.QAA.001	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Perpustakaan Proklamator Bung Karno (orang)					
	057.DM.52	Kegiatan:						
	72	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta						
	057.DM.527	RO:	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	0	375	550	600	
	2.QAA.001	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (orang)					

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	KODE	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA					
		(1)	(2)			(3)	(4)	2021		2022	2023	2024	(5)	(6)
	059.GB	PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)												
	059.GB.41 53	Kegiatan: Sumber Daya Manusia Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										
	059.GB.415 3.SCA.001	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika		Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi (orang)	7.500	460	500	500	500					
	059.GB.415 3.SCA.002	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Makassar*		Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Makassar (orang)	500	1.250	1.750	1.250	1.250					
	059.GB.415 3.SCA.003	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Medan*		Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Medan (orang)	500	1.650	1.750	1.250	1.250					

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	059.GB.415 3.SCA.004	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Jakarta*	(3) Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Jakarta (orang)	(4) 900	(5) 1.300	1.250	750	(6)
	059.GB.415 3.SCA.005	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Bandung*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Bandung (orang)	900	1.150	1.250	750	
	059.GB.415 3.SCA.006	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Yogyakarta*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Yogyakarta (orang).	900	1.250	1.250	750	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	059.GB.415 3.SCA.007	(2) RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Surabaya*	(3) Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Surabaya (orang)	(4) 900	(5) 1.200	1.250	750	750	(6)
	059.GB.415 3.SCA.008	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Banjarmasin*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Banjarmasin (orang)	900	950	1.000	750	750	
	059.GB.415 3.SCA.009	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Manado*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Manado (orang)	900	850	1.000	750	750	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)	059.GB.415 3.SCA.010	(2) RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika balai pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi*	(3) Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pelatihan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Cikarang (orang)	(4) 700	(5) 2.204	2.500	2.000	2.000	(6)
	059.GB.44	Kegiatan:							
	95	Pengembangan Kompetensi Digital bagi Masyarakat							
	059.GB.449 5.SCA.001	RO: <i>Digital talent scholarship*</i>	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	48.286	103	33.000	33.000	
	059.GB.449 5.SCA.011	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di pusat pendidikan dan pelatihan*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	14.700	20.000	1.250	1.250	
	059.GB.449 5.SCA.012	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Medan*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	4.310	6.000	850	850	
	059.GB.449 5.SCA.013	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Makassar*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	2.310	5.000	850	850	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	(2)			(3)	2021	2022		2023
(1)	059.GB.449 5.SCA.014	RO: Digital talent scholarship di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Jakarta*	(3) Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	(4) 35.000	(5) 1.780	2.750	550	550	(6)
	059.GB.449 5.SCA.015	RO: Digital talent scholarship di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Bandung*	Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.016	RO: Digital talent scholarship di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Yogyakarta*	Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.017	RO: Digital talent scholarship di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian	Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	059.GB.449 5.SCA.018	Surabaya* RO: Digital talent scholarship di wilayah kerja sumber daya manusia dan penelitian Banjarmasin*	Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550
	059.GB.449 5.SCA.019	RO: Digital talent scholarship di wilayah kerja sumber daya manusia dan penelitian Manado*	Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550
	059.GB.449 5.SCA.020	RO: Digital talent scholarship di balai pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi*	Jumlah peserta digital talent scholarship (orang)	35.000	6.950	35.950	750	750
	059.GB.45 00	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komunikasi dan Informatika						
	059.GB.450 0.DBA.001	RO: Pendidikan diploma IV, strata 1 dan pendidikan pelatihan teknis	Jumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (orang)	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
	059.GB.450 0.SCA.001	RO: Sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional	Jumlah peserta pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang komunikasi dan informatika	400	500	500	500	500

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2) Indonesia bidang komunikasi dan informatika	(3) yang tersertifikasi di Sekolah Tinggi Multi Media (orang)	(4)	(5)			(6)
	122.AH	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA						
	122.AH.43	Kegiatan:						
	72	Penyusunan Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila						
	122.AH.437	RO:	Jumlah NSPK standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (dokumen)	3	10	10	10	10
	2.PFA.001	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	122.AH.43	Kegiatan:						
	73	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila						
	122.AH.437	RO:	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (lembaga/orang)	3	1.640	1.440	2.440	2.760
	3.SCJ.001	Layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila						
	122.AH.43	Kegiatan:						
	74	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila						
	122.AH.437	RO:	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan ideologi	3	1	1	1	1
	4.ABC.001	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2) Pancasila	(3) Pancasila (rekomendasi kebijakan)	(4)			(5)	(6)
	027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL						
	027.DQ.6	Kegiatan: Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana						
	027.DQ.628	RO: Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana*		130.000	125.048	100.000	145.000	150.000
	1.QDC.101	Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana*						
	019.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI						
	019.DL.49	Kegiatan: Pendidikan Tinggi Vokasi Industri						
	019.DL.495	RO: Tenaga kerja tingkat ahli yang kompeten (orang)		11.512	11.405	10.229	11.600	11.650
	8.SAG.001	Mahasiswa dan lulusan program diploma III dan diploma IV berbasis kompetensi						
	019.DL.495	RO: Tenaga kerja industri lulusan diploma I dan diploma II yang kompeten (orang)		926	2.833	1.550	1.100	1.200
	8.SAG.002	Mahasiswa dan lulusan program diploma I dan diploma II berbasis kompetensi						
	019.DL	Kegiatan: Pendidikan Menengah Kejuruan Industri						
	019.DL.495	RO: Tenaga kerja industri		7.522	7.563	7.500	7.200	7.200

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	9.SAG.001	(2) Sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri	(3) tingkat terampil yang kompeten (orang)	(4)	(5)			(6)
	019.DL.495 9.PEC.001	RO: SMK yang <i>link and match</i> dengan industri	Jumlah pengembangan SMK berbasis kompetensi yang <i>link and match</i> dengan industri (sekolah)	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600
	024.DG	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
	024.DG.2	Kegiatan:						
	075	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan						
	024.DG.207	RO: Bantuan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan penerima bantuan biaya pendidikan berkelanjutan (orang)	2.099	1.869	2.485	2.410	
	5.BEJ.001							
	024.DG.207	RO: Afirmasi bantuan biaya pendidikan dokter pada tertinggal kepulauan dan bermasalah kesehatan	Jumlah peserta program afirmasi bantuan biaya pendidikan dokter pada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan (orang)	0	8	33	8	8
	5.BEJ.003							
	024.DD	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT						
	024.DD.5	Kegiatan:						
	833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)	024.DD.583 3.SCM.002	RO: Peningkatan kapasitas Pramuka dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat	(3) Jumlah kesehatan/Saka Bakti Husada yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	(4) 0	(5) 0	2.000	2.000	2.000	(6)
	018.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
	018.DL.58	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian							
	018.DL.589 2.SAC.001	RO: Pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan bagi mahasiswa politeknik pembangunan pertanian (orang)	1.579	5.264	10.338	6.300	7.000	
	018.DL.589 2.SAC.003	RO: Pendidikan menengah vokasi pertanian	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan menengah bagi siswa SMK/penyuluhan pertanian (orang)	280	867	1.026	932	932	
	018.DL.18 10	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)	018.DL.181 0.DCC.003	(2) RO: Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur dan nonaparatur	(3) Jumlah aparatur dan nonaparatur yang mengikuti pelatihan vokasi (orang)	(4) 12.687	(5) 39.235	3.900	23.360	28.032	(6)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI									
022.DL	Kegiatan:								
022.DL.39	Pendidikan Transportasi								
022.DL.399	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (pola pembibitan) transportasi darat (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan darat (orang)	3.504	5.413	6.531	5.994	5.994	5.994	
022.DL.399	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (non pola pembibitan) transportasi darat (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan darat (orang)	1.700	774	514	512	512	512	
022.DL.399	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan non reguler (mandiri) transportasi darat (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan darat (orang)	175	369	361	313	313	313	
022.DL.399	RO:	Jumlah lulusan pendidikan	2.448	2.708	3.414	3.414	3.414	3.414	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)				(6)
	6.SAB.006	Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (pola pembibitan) transportasi laut (prioritas nasional)	dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan laut (orang)						
	022.DL.399 6.SAB.004	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (non pola pembibitan) transportasi laut (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan laut (orang)	14.144	9.518	8.488	8.488	8.488	
	022.DL.399 6.SAB.005	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan non reguler (mandiri) transportasi laut (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan laut (orang)	-	4.190	4.977	4.977	4.977	
	022.DL.3996 .SAB.009	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (pola pembibitan) transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	1.792	2.221	2.713	2.713	2.713	
	022.DL.3996 .SAB.007	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (non pola pembibitan) transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	2.866	1.309	1.120	1.120	1.120	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	022.DL.3996 .SAB.008	(2) RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan non reguler (mandiri) transportasi udara (prioritas nasional)	(3) Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	(4) 383	(5) 1.632	1.186	1.186	1.186
	022.DL.399 6.SAB.008	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan beasiswa sumber daya manusia transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	95	169	35	37	37
	032.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI						
	032.DL.23 75	Kegiatan: Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
	032.DL.237 5.QDD.001	RO: Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan*	Jumlah kelompok pelaku utama atau pelaku usaha yang disuluh (kelompok masyarakat)	41.000	41.000	41.000	44.000	45.000
	032.DL.237 5.SCC.001	RO: Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih*	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	10.000	15.000	25.000	28.000	30.000
	032.DL.23 76	Kegiatan: Pendidikan Kelautan dan Perikanan						

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	032.DL.237 6.SAC.001	(2) RO: Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	(3) Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	(4) 8.171	(5) 8.308	8.535	12.286	13.115	(6)
	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja 1. Pemuda wirausaha kerah putih; dan 2. Tingkat pengangguran terbuka Pemuda. Bentuk Koordinasi: Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda		<p>Persentase penduduk berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun</p> <p>Persentase jumlah Pengangguran Pemuda</p>	0,44	0,52	0,56	0,6	0,64	
				15,23	13,43	13,17	12,91	12,65	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
			berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun terhadap jumlah angkatan kerja Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun					
	040.EA	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif
	040.EA.43	Kegiatan:						
	21	Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif						
	040.EA.432	RO:	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual (orang)	1.270	460	2.500	2.800	
	1.QDC.001	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual						
	067.CT	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN, DAN TRANSMIGRASI						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan
	067.CT.64	Kegiatan:						
	67	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi						
	067.CT.646	RO:	Jumlah pengelola badan usaha milik desa yang	0	150	150	150	
	7.DCJ.U02.	Pengelola badan usaha milik desa	milik desa					

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)		(2) yang dilatih oleh unit pelaksana teknis balai besar Jakarta di lokasi jangkauan darat	(3) dilatih (orang)	(4)	(5)				(6) daerah tertinggal, dan transmigrasi
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.38	Kegiatan:							
	08	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda							
	092.DB.380	RO:	Jumlah Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (orang)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	8.QDC.001	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan							
	092.DB.380	RO:	Jumlah senira kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan (provinsi)	34	34	34	34	34	
	8.QE1.001	Senira kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan							
	092.DA	PROGRAM KEOLAHRAGAAN							
	092.DA.38	Kegiatan:							
	31	Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga							
	092.DA.383	RO:	Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan	500	500	500	500	500	
	1.BDC.001	Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2) pelatihan manajemen usaha	(3) pelatihan manajemen usaha (orang)	(4)			(5)	(6)
	047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						
	047.DE.27	Kegiatan:						
	95	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi						
	047.DE.279	RO:	Jumlah perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan (orang)					
	5.SCJ.002	Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan*		N/A	N/A	11.000	11.000	11.000
								Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
	019.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI						
	019.DL.49	Kegiatan:						
	57	Pelatihan Vokasi Industri						
	019.DL.495	RO:	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri (orang)					
	7.SCH.001	Tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi)		18.919	86.500	25.800	95.000	100.000
	019.DL.495	RO:	Tenaga kerja industri yang	3.968	10.000	1.500	20.000	20.000

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	7.PDI.001	(2) Tenaga kerja industri kompeten yang tersertifikasi	(3) mendapatkan sertifikasi kompetensi (orang)	(4)	(5)			(6)
	018.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
	018.DL.58	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian						
	018.DL.589	RO: Wirausahawan muda pertanian	Terselurkannya bantuan operasional usaha bagi mahasiswa, siswa, dan pemuda tani (kelompok masyarakat)	234	382	556	1.119	1.119
	2.QDD.001							
	018.DL.18	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian						
	018.DL.181	RO: Pembinaan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya	Jumlah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya yang terfasilitasi dan terbina (lembaga)	155	97	100	144	173
	0.BDB.001							
	018.DL.181	RO: Fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (readsi) untuk panen	Jumlah petani yang dilatih mengenai peningkatan produksi/teknologi pasca panen (kelompok	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2) peningkatan kapasitas petani	(3) masyarakat	(4)	(5)			(6)
	044.EB	PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN KOPERASI						Kementerian yang menyelenggarakan urusan
	044.EB.56	Kegiatan:						pemerintahan di
	15	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional						bidang koperasi
	044.EB.561	RO:	Terlaksananya pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan (orang)	0	200	250	300	350
	5.SCF.001	Pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan						dan usaha kecil dan menengah
	044.EB.44	Kegiatan:						
	42	Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian						
	044.EB.444	RO:	Terlaksananya Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi (koperasi)	0	0	50	50	50
	2.QDF.001	Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi						
	044.EB.44	Kegiatan:						
	46	Perkuatan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro						
	044.EB.444	RO:	Terlaksananya usaha mikro yang difasilitasi pendampingan usaha kredit rakyat dan sertifikasi hak atas	0	100	100	100	100
	6.QDG.001	Usaha mikro yang difasilitasi untuk peningkatan usaha (kredit usaha rakyat dan sertifikasi hak atas						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		tanah)	(usaha mikro kecil dan menengah)					
	044.EB.44	Kegiatan:						
	56	Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha						
	044.EB.445	RO:	Terselenggaranya fasilitas inkubasi bagi wirausaha muda (orang)	0	15	15	15	15
	6.QD3.001	Fasilitasi dan pembinaan <i>start-up</i>						
	044.EB.27	Kegiatan:						
	57	Konsultasi Bisnis dan Pendampingan						
	044.EB.275	RO:	Terselenggaranya	0	150	200	250	450
	7.QDC.001	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitas konsultasi bisnis	wirausaha yang menerima fasilitas konsultasi bisnis (orang)					
	044.EB.275	RO:	Terselenggaranya	0	650	1.000	1.100	1.200
	7.SCF.001	Jumlah wirausaha yang didampingi Usahanya	wirausaha yang didampingi usahanya (orang)					
	044.EB.275	RO:	Pelatihan pemasyarakatan	0	0	1.000	1.100	1.200
	7.QDC.003	Peserta pemasyarakatan Kewirausahaan	kwirauusahaan (orang)					
	044.EB.44	Kegiatan:						
	55	Pembiayaan Wirausaha						
	044.EB.445	RO:	Terciptanya wirausaha yang difasilitasi perluasan akses	0	0	300	330	360
	5.BDC.001	Wirausaha yang difasilitasi						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	044.EB.445	perluasan akses pembiayaan	pendanaan alternatif (orang)					
	5.QDC.002	RO: Wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan	Terciptanya wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan (orang)	0	0	300	330	360
	025.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI						
	025.DL.40	Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan						
	025.DL.405	Sarana dan prasarana bidang pelatihan dan produktivitas	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarana (lembaga)	63	0	241	241	241
	6.RAJ.001							
	025.DL.40	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas						
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi di unit pelaksana teknis pusat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	25.904	21.472	34.097	34.097	34.097
	0.SCH.001							
	025.DL.406	RO: Pelatihan kerjasama pihak ketiga (PFLK)	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	655	656	655	655	655
	0.SCH.002							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	025.DL.406 0.SCH.003	RO: Pelatihan berbasis kompetensi di balai latihan kerja komunitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	67.615	43.552	44.624	44.624	44.624
	025.DL.406 0.SCH.004	RO: Pelatihan berbasis kompetensi calon pekerja migran Indonesia	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	3.008	129	4.048	4.048	4.048
	025.DL.406 0.SCH.006	RO: Pelatihan berbasis kompetensi kerjasama dengan dunia industri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	4.800	1.649	5.952	5.952	5.952
	025.DL.406 0.SCH.008	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jawa Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	6.448	5.776	5.008	5.008	5.008
	025.DL.406 0.SCH.009	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jawa Tengah	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	8.464	7.568	5.680	5.680	5.680
	025.DL.406 0.SCH.010	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi D.I. Yogyakarta	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	2.064	1.824	1.360	1.360	1.360
	025.DL.406 0.SCH.011	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jawa Timur	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	10.288	8.399	8.528	8.528	8.528
	025.DL.406 0.SCH.012	RO: Pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	1.520	1.520	1.840	1.840	1.840

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)			(6)
	025.DL.406	Provinsi Aceh	berbasis kompetensi (orang)					
	0.SCH.013	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sumatera Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.600	2.464	2.464	2.464	
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sumatera Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	2.416	1.680	1.680	1.680	
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Riau	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	816	1.232	1.232	1.232	
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jambi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.072	1.616	1.616	1.616	
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.536	1.824	1.824	1.824	
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Lampung	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	672	976	976	976	
	025.DL.406	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	800	976	976	976	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	1.136	1.888	1.888	1.888	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	0.SCH.020	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Tengah	(3) mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.952	1.440	1.440	1.440	1.440	
	0.SCH.021	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	752	688	1.072	1.072	1.072	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	640	640	864	864	864	
	0.SCH.022	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	848	848	1.472	1.472	1.472	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	2.320	2.320	3.520	3.520	3.520	
	0.SCH.023	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	752	720	1.200	1.200	1.200	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	0.SCH.024	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	0.SCH.025	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	0.SCH.026	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
0.SCH.027	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Maluku	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432		

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	025.DL.406 0.SCH.028 025.DL.406 0.SCH.029 025.DL.406 0.SCH.030 025.DL.406 0.SCH.031 025.DL.406 0.SCH.032 025.DL.406 0.SCH.033 025.DL.406 0.SCH.034 025.DL.406 0.SCH.035	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Bali RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Nusa Tenggara Barat RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Nusa Tenggara Timur RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Papua RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Bengkulu RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Banten RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Bangka Belitung RO: Pelatihan berbasis kompetensi	(3) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang) Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	(4)	(5)			(6)	
				1.552	1.040	1.040	1.040		
				1.936	1.360	1.360	1.360		
				848	1.200	1.200	1.200		
				1.232	1.056	1.056	1.056		
				1.760	1.040	1.040	1.040		
				352	784	784	784		
				480	480	480	480		
				608	992	992	992		

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)
	Provinsi Gorontalo	berbasis kompetensi (orang)						
025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	256					
0.SCH.036	Pelatihan berbasis kompetensi	mendapat pelatihan		400	400	400	400	
	Provinsi Kepulauan Riau	berbasis kompetensi (orang)						
025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	224					
0.SCH.037	Pelatihan berbasis kompetensi	mendapat pelatihan		368	368	368	368	
	Provinsi Sulawesi Barat	berbasis kompetensi (orang)						
025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	624					
0.SCH.038	Pelatihan berbasis kompetensi	mendapat pelatihan		768	768	768	768	
	Provinsi Kalimantan Utara	berbasis kompetensi (orang)						
025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	80					
0.SCH.039	Pelatihan berbasis kompetensi	mendapat pelatihan		496	496	496	496	
	Provinsi Maluku Utara	berbasis kompetensi (orang)						
025.DL.406	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	240					
0.SCH.040	Pelatihan berbasis kompetensi	mendapat pelatihan		320	320	320	320	
	Provinsi Papua Barat	berbasis kompetensi (orang)						
025.DL.405	RO:	Jumlah tenaga kerja yang	212.502					
3.PDI.003	Sertifikasi kompetensi tenaga	disertifikasi (orang)		147.159	230.976	230.976	230.976	
	kerja berkeahlian menengah tinggi							
026.DN	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN							
026.DN.21	Kegiatan:							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	KODE	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
		(2)				(3)	(4)	(5)	
(1)	75	Perluasan Kesempatan Kerja							
	026.DN.217	RO: Tenaga kerja mandiri pemuda yang dibina		Jumlah tenaga kerja mandiri pemuda yang dibina (orang)	N/A	38.928	50.000	52.000	54.000
	026.DN.661	RO: Fasilitasi dan pembinaan masyarakat tenaga kerja mandiri lanjutan		Jumlah tenaga kerja mandiri pemuda yang menjadi tenaga kerja mandiri lanjutan (orang)	N/A	1.800	2.000	3.000	3.000
	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan:			Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (persen/%)	81,36 (2018)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	1. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;								
	2. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi; dan								
	3. Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan.								
	Bentuk Koordinasi:								
	a. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;								
	b. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan								
	c. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.				6,36 (2018)	6,56	6,69	6,82	6,95
				Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat					

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
		kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir (persen,%)						
		Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut (persen,%)	6,72 (2018)	7,06	7,27	7,49	7,7	
029.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							
029.DL.54	Kegiatan:							
43	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan							
029.DL.544	RO:	Jumlah sumber daya						
3.DCE.001	Sumber manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup	manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan	1.530	1.005	660	4.000	4.000	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	
	029.DL.544 3.QDB.001	dan kehutanan RO: Pembinaan kepedulian dan budaya lingkungan hidup	kehutanan (orang) Jumlah lembaga yang dibina perihal kepedulian dan budaya lingkungan hidup (lembaga)	0	260	230	960	1.080	
	027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL							
	027.DQ.6 274	Kegiatan: Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu							
	027.DQ.627 4.BDB.101	Karang taruna yang diberdayakan*	Jumlah karang taruna yang diberdayakan (karang taruna)	100	600	600	600	600	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN							
	092.DB.38 13	Kegiatan: Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan							
	092.DB.381 3.QEI.001	Organisasi kepramukaan nasional/satuan pramuka/satuan komunitas)	Jumlah kepramukaan nasional/satuan pramuka/satuan organisasi kepramukaan (kwartir karya nasional/satuan karya pramuka/satuan)	17	17	17	17	17	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	(2)			(3)	2021	2022	2023	
(1)		yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	(3) komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (organisasi)	(4)		(5)			(6)
092.DB.381 3.QEI.002	RO: Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Jumlah organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (organisasi)	7	7	7	7	7		
092.DB.381 3.QDC.001	RO: Pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi Kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen (orang)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
092.DB.3810	Kegiatan: Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda								
092.DB.381 0.QDC.001	RO: Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda (orang)	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232		

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	KODE	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
		(1)	(2)			(3)	(4)	2021		2022
	092.DA	PROGRAM KEOLAHRAGAAN								
	092.DA.38	Kegiatan:								
	22	Pengembangan Olahraga Rekreasi								
	092.DA.382	Peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, tantangan, dan wisata yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitasi (orang)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2.QDC.001									
	092.DA.38	Kegiatan:								
	21	Pengembangan Olahraga Pendidikan								
	092.DA.382	Peserta kampanye olahraga olimpiak di sekolah dasar, menengah, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga olimpiak di sekolah dasar, menengah, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi (orang)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	1.QDC.002									
	092.DA.38	Kegiatan:								
	20	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus								
	092.DA.382	Peserta kampanye olahraga tradisional, usia penyandang disabilitas yang penyandang disabilitas	Jumlah peserta kampanye olahraga tradisional, usia dimi, lansia, dan penyandang disabilitas	11.274	11.274	11.274	11.274	11.274	11.274	
	0.QDC.002									

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
B. KAJIAN DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	terfasilitasi	yang terfasilitasi (orang)						
	Bentuk Koordinasi: a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda; b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i> , pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.	Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda yang terlaksana dan dimanfaatkan (kajian)	10	11	11	11		
	066.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						Lembaga yang melaksanakan tugas
	066.WA.3	Kegiatan:						
	242	Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		Gelap Narkotika						
	066.WA.324 2.EAJ.967	RO: Layanan data dan informasi	Jumlah layanan data dan informasi (layanan)	1	1	1	1	pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.38 12	Kegiatan: Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda						
	092.DB.381 2.PEA.001	RO: Kementerian/lembaga/provinsi yang bekerja sama dalam kemitraan Kepemudaan	Jumlah koordinasi dengan lembaga lintas sektoral, Pemerintah Daerah, dan luar negeri	9	9	9	9	
	010.CM	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
	010.CM.6 139	Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah						
	010.CM.613 9.UBA.027	RO: Daerah yang menerapkan	Jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi	0	18	24	30	34

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	(2)			(3)	2021	2022	
(1)		rencana aksi pada penyelenggaraan Kepemudaan	(3) pada penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan (provinsi/kabupaten/kota)	(4)	(5)			(6)
C. KEGIATAN MENGATASI DEKADENSI MORAL, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN KEKERASAN, SERTA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA		<p>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kesakitan Pemuda; 2. Pemuda korban kejahatan; 3. Pemuda merokok; dan 4. Remaja perempuan sedang hamil. <p>Bentuk Koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i>, dan perdagangan manusia; b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial; c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan; d. peningkatan perlindungan Pemuda 	<p>Proporsi Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persen,%)</p> <p>Proporsi Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam</p>	8,58	8,15	8,05	7,95	7,85
				1,14	1,31	1,34	1,37	1,39

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental. e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa. g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.	kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persen/%) Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persen/%) Persentase remaja perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	25,7	25,63	25,48	25,33	25,17	
			18,22	17,47	17,44	17,4	17,37	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
		(persen/%)							
	122.AH	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA							
	122.AH.43	Kegiatan:							
	63	Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila							
	122.AH.436	RO:	Jumlah dokumen sosialisasi kepada kementerian/ lembaga/diacrah (layanan)	1	4	4	4	4	Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
	3.QMB.001	Layanan sosialisasi kepada kementerian/ lembaga/diacrah							
	122.AH.43	Kegiatan:							
	66	Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.436	RO:	Jumlah rekomendasi pendampingan (rekomendasi kebijakan)	1	1	1	1	1	
	6.ABD.002	Rekomendasi pendampingan pembinaan ideologi Pancasila							
	122.AH.43	Kegiatan:							
	70	Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.43	RO:	NSPK materi, bahan ajar,	1	1	1	1	1	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	70.AFA.00 2	NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila	(3) dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila (dokumen)	(4)	(5)			(6)
066.BL	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA							
066.BL.59	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Edukasi							
066.BL.593	RO:	Remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk (orang)		0	1730	1730	1730	1730
6.QDC.001	Pembentukan remaja sebaya anti narkotika							
066.BL.593	RO:	Jumlah SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i> (sekolah)		0	34	34	34	34
6.QDB.001	SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i>							
066.BL.32	Kegiatan: Penyelenggaraan Advokasi							
066.BL.324	RO:	Jumlah dcsa yang di program ketahanan advokasi keluarga berbasis sumber daya ketahanan		0	346	588	414	414
7.UBB.001	Advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya ketahanan							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		desa	berbasis sumber daya desa (desa)					
	066.BL.324 7.QDE.002	RO: Pendampingan keluarga anti narkotika	Jumlah keluarga penerima program ketahanan keluarga anti narkotika (keluarga)	0	1.039	1.040	865	865
	113.BA	PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME						
	113.BA.50	Kegiatan: Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan						
	113.BA.509 6.QHB.001	RO: Kegiatan kontra radikalisasi	Jumlah operasi kontra radikalisasi (operasi)	48	56	56	56	56
	113.BA.509 6.PEB.001	RO: Forum koordinasi pencegahan terorisme	Teriaksananya forum koordinasi pencegahan terorisme (forum)	32	32	35	35	35
	024.DO	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT						
	024.DO.2	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular						
	024.DO.206 1.PEF.002	RO: Sosialisasi pencegahan dan	Jumlah sosialisasi dan	0	1.005	4.050	4.050	4.050

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik (orang)					di bidang kesehatan
	024.DO.206 1.PEF.005	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional	Jumlah sosialisasi dan pengendalian gangguan fungsional (orang)	0	518	2.000	2.000	2.000
	024.DO.206 1.PEF.006	RO: Sosialisasi pelaksanaan layanan kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok (orang)	0	938	1.150	1.150	1.150
	024.DO.5 837	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya						
	024.DO.583 7.QAA.004	RO: Pelayanan kesehatan penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan rehabilitasi medis (orang)	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	024.DO.2 060	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung						
	024.DO.206 0.PEF.001	RO: Sosialisasi pencegahan dan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	0	600	2.250	2.250	2.250

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		pengendalian penyakit <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> .	pencegahan dan pengendalian penyakit <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> . (orang)					
	024.DO.206 0.PEF.002	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual (orang)	0	250	130	130	
	024.DO.206 0.PEF.031	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan pengendalian penyakit tuberkulosis (orang)	0	1.267	1.000	1.000	
	059.GB	PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
	059.GB.44 96	Kegiatan: Pengembangan Literasi Digital bagi Masyarakat						
	059.GB.449	RO: Jumlah masyarakat yang		213.143	12.448.750	5.500.000	12.448.750	12.448.750

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	6.QDC.004	Literasi digital*	(3) mendapatkan literasi di bidang digital (orang)	(4)		(5)		(6) di bidang komunikasi dan informatika
	059.GB.45 02	Kegiatan: Pengendalian Konten dan Aplikasi Informatika						
	059.GB.450 2.QIA.001	RO: Penanganan dan penanggulangan konten negatif*	Total konten internet yang bisa ditangani per tahun (konten negatif)	50.000	150.000	175.000	210.000	250.000
	047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						
	047.DE.28 09	Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
	047.DE.280 9.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah)	21	25	28	31	34
	047.DE.27 97	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan						
	2797.UBA.0 01	RO: Daerah yang diberikan bimbingan	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis	10	17	20	27	34

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)		(2) teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus*	(3) dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat, dan kondisi khusus (daerah provinsi)	(4)	(5)				(6)
	2797.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan)	-	5	2	2	2	
	047.DE.28 00	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang							
	047.DE.280 0.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang	15	20	17	32	34	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang*	pelaksanaan kebijakan perlindungan hak tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)					
	047.DE.280 0.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	15	20	10	32	34
	047.DE.280 0.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan hak perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan)	4	7	4	4	4
	027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL						
	027.DQ.6	Kegiatan:						
								ketenagakerjaan . . . Kementerian yang menyelenggarakan

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	277	(2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan	(3) Jumlah korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial* Domain Gender dan Diskriminasi: 1. perkawinan usia anak; 2. Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi; dan 3. Pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Bentuk Koordinasi: a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i> , dan perdagangan manusia; b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial; c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan; d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap	(4) 20.000	(5) 20.000 21.000 21.000			(6) urusan pemerintahan di bidang sosial
			Jumlah korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang) Persentase Pemuda perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun di antara seluruh perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun (persen/%) Persentase Pemuda perempuan berusia 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang sedang bersekolah di	20.000	21.000	21.000	21.000	
				10,35	10,18	9,89	9,6	9,31
				39,37	40,22	40,73	41,25	41,77

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	
		perilaku kekerasan baik fisik maupun mental; e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.	(3) jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi (persen/%) Persentase Pemuda perempuan berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang bekerja di sektor formal (persen/%) 22,31			24,98	25,25	25,52	
068.DJ PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA									
068.DJ.33 Kegiatan: Pembinaan Ketahanan Remaja									
		RO: Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelemagaan genre	Jumlah provinsi yang mendapatkan pembinaan pelemagaan genre dalam rangka pembentukan karakter remaja (provinsi)	34	34	34	34	34	Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
068.DJ.33	31	Kegiatan: Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi							

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	068.DJ.333 1.QDD.001	(2) RO: Pusat Informasi Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitas dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	(3) Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitas pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu (kelompok masyarakat)	(4) 29.327	(5) 29.620 31.101 32.656 34.289			(6)
	047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
	047.DE.28 09	Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan						
	047.DE.280 9.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah)	21	25	28	31	34
	047.DE.27 97	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan						

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023		2024
(1)	2797.UBA.01	(2) RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus*	(3) Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus (daerah provinsi)	(4) 10	(5) 17	20	27	34	(6)
	2797.QMB.01	RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan)	N/A	5	2	2	2	
	047.DE.2800	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang							
	047.DE.280	RO:	Jumlah daerah yang	15	20	17	32	34	

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)	0.UBA.001	(2) Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang*	(3) diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan hak perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	(4)	(5)			(6)
	047.DE.280 0.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan hak perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	15	20	10	32	34
	047.DE.280 0.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan hak perlindungan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan)	4	7	4	4	4

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	KODE	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA					
		(1)	(2)			(3)	(4)	2021		2022	2023	2024	(5)	(6)
	047.DE.27 94		Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya											
	047.DE.279 4.UBA.001		RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (daerah provinsi)	8	19	9	9	9	9				
	047.DE.279 4.UBA.003		RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penurunan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penurunan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan (daerah provinsi)	N/A	N/A	4	4	4	4				
	047.DE.27 95		Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi											
	047.DE.279 5.UBA.001		RO: Daerah yang diberikan bimbingan	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis	4	5	5	5	5	5				

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
		teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi*	dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi (daerah provinsi)					
	047.DE.279 5.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan*	Jumlah sumber daya manusia program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (daerah provinsi)	N/A	5	15	15	15
	047.DE.279 5.SCJ.001	RO: Sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak*	Jumlah sumber daya manusia program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (orang)	0	1.500	2.500	2.000	2.000
	047.DE.59 20	Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan						
	047.DE.592 0.BDB.001	RO: Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang difasilitasi	0	156	35	40	50

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	KODE	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET			K/L PELAKSANA	
		(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		2021
			dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak*	dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak (organisasi)	(4)					(6)
	047.DE.59	Kegiatan:								
	18	Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha								
	047.DE.591	RO:	Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, dan media yang melakukan sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (lembaga)		0	151	172	216	270	
	8.QDB.001	Lembaga profesi dan dunia usaha yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak*								
	092.DB	PRO GRAM KEPEMUDAAN								Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.38	Kegiatan:								
	17	Peningkatan Wawasan Pemuda								
	092.DB.381	RO:	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam wawasan peningkatan wawasan		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	7.QDC.003	Pemuda kader yang terfasilitasi dalam wawasan peningkatan wawasan								

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	kebangsaan dan anti faham radikalisme	(3) kebangsaan dan anti faham radikalisme (orang)	(4)			(5)		(6)

Keterangan:

* Target tidak sepenuhnya menyasar ke Pemuda, namun diharapkan tersedia data terpilah berdasarkan usia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO